



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 108 / RB.06 /2018  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi  
Tahun 2017

Jakarta, 8 Maret 2018

Yth. Bupati Landak  
di

**Ngabang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Landak. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi ini difokuskan untuk menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik pada Pemda tersebut dan seberapa jauh kemajuan yang sudah berhasil diwujudkan

Simpulan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Landak adalah **59,80** dengan kategori "**CC**" yang dirinci sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
I	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,85
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,09
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,18
4	Penataan Tatalaksana	5,00	1,84
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,86
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,92
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,98
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,51



No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	31,23
II	Komponen Hasil		
1	Nilai Akuntabilitas Publik	14	7,85
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6	5,23
3	Survey Eksternal Persepsi Anti Korupsi	7	5,32
4	Opini BPK	3	3
5	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10	7,17
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	28,57
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	59,80

2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari indeks reformasi birokrasi Kabupaten Landak tahun 2017 belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini terlihat bahwa pencapaian dari hampir setiap area perubahan masih di bawah 50%. Beberapa catatan terkait dengan hasil evaluasi terhadap area perubahan yang merefleksikan kondisi manajemen internal Pemerintah Kabupaten Landak sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Tim RB maupun agen perubahan yang dibentuk belum menyusun rencana aksi secara konkrit untuk memastikan rencana kerja yang ada dalam *Road Map* RB terlaksana dengan baik;
- b. Sosialisasi dan internalisasi atas berbagai kebijakan dan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Landak belum efektif dan merata kepada seluruh pegawai. Hal ini tampak pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih banyak dilakukan pada tingkat pusat Pemerintah Kabupaten saja, sedangkan pada tingkat unit kerja pelaksanaan reformasi birokrasi belum banyak dilakukan.
- c. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan belum dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam menjamin bahwa aturan yang ditetapkan oleh instansi telah harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- d. Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan sehingga berpotensi mengganggu pencapaian kinerja yang akan diwujudkan.
- e. Proses bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antar SOP maupun inter SOP dalam mewujudkan kinerja Kabupaten belum disusun, sehingga SOP yang ada belum merupakan turunan dari proses bisnis;
- f. Pengelolaan SDM masih berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian. Sedangkan pengelolaan kinerja individu, pengelolaan kompetensi dan pengelolaan karir pegawai belum dinisiasi dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Aparatur Kabupaten;



- g. Pelaksanaan pengawasan untuk membangun integritas organisasi melalui penerapan kebijakan penanganan gratifikasi, sistem *whistle blower*, benturan kepentingan dan pembangunan zona integritas pada unit kerja pelayanan masih belum optimal dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi.
- h. Pelaksanaan zona integritas menuju WBK/WBBM belum sepenuhnya memberikan dampak perubahan yang berarti kepada percepatan pembangunan reformasi birokrasi di Kabupaten Landak.
- i. Dalam upaya menumbuhkan budaya kinerja untuk mendorong penerapan akuntabilitas kinerja yang optimal di kabupaten Landak, pemberian *reward* kepada unit yang berprestasi dan pengenaan sanksi kepada unit yang kurang berprestasi belum diinisiasi pelaksanaannya.
- j. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan belum optimal dalam upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Hasil Survei

Dari hasil survei internal, survei persepsi anti korupsi dan survei kualitas pelayanan publik didapat hasilnya sebagai berikut:

#### a) Survei Internal

Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks **5,23** dalam skala 6. Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal.

Indeks tersebut jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yaitu 4,53, indeks integritas organisasi Pemerintah Kabupaten Landak masih berada di atas rata-rata. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat integritas dan pelayanan internal Pemerintah Kabupaten Landak terhadap pegawai sudah cukup baik.

#### b) Survei Eksternal

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks **7,17** dalam skala 10. Indeks tersebut menunjukkan tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
- 2) Hasil survei persepsi anti korupsi yang menunjukkan indeks **5,32** dalam skala 7. Indeks tersebut menggambarkan persepsi *stakeholder* terhadap pembangunan anti korupsi di Pemerintah Kabupaten Landak.